

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PERUBAHAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA OPD (ESELON 2)

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN : 2023

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	79 = B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	TW 1 = 1
				1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			TW 2 = 1
				1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	TW 3 = 1
				1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			TW 4 = 1
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B > 60 – 70		1.3				TW 1 = -
				1.3.1			Paket	

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	80,00 (Persen)		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		TW 2 = 1 TW 3 = - TW 4 = -
					1.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	TW 1 = 2 TW 2 = 2 TW 3 = 3 TW 4 = 3
					1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	TW 1 = 3 TW 2 = 3 TW 3 = 3 TW 4 = 3
					1.4.2 Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	TW 1 = 3 TW 2 = 3

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan		TW 3 = 3 TW 4 = 3
					1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	TW 1 = 1 TW 2 = 2 TW 3 = 3 TW 4 = 2
					1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	TW 1 = 3 TW 2 = 3 TW 3 = 3 TW 4 = 3
					1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	TW 1 = 3 TW 2 = 3 TW 3 = 3 TW 4 = 3

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	TW 1 = 3 TW 2 = 3 TW 3 = 3 TW 4 = 3
					1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan TW 1 = 2 TW 2 = 2 TW 3 = 2 TW 4 = 2
					1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan TW 1 = 20 TW 2 = 25 TW 3 = 25 TW 4 = 6

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	TW 1 =
									TW 2 =
									TW 3 = 1
									TW 4 =
					1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		TW 1 = 1
									TW 2 = 4
									TW 3 = 8
									TW 4 =
			1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	TW 1 = 3
									TW 2 = 3
									TW 3 = 3

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Daerah				TW 4 = 3
					1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	TW 1 = 1
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		TW 2 = 1
								TW 3 = 1
								TW 4 = 1
					1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	TW 1 = 3
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		TW 2 = 3
								TW 3 = 3
								TW 4 = 3
				1.7	1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	TW 1 = 20
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan		TW 2 = 20
								TW 3 = 20

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Urusan Pemerintahan Daerah		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya	TW 4 = 20	
					1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	TW 1 = 1 TW 2 = 1 TW 3 = 1 TW 4 =
					1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	TW 1 = 10 TW 2 = 15 TW 3 = 15 TW 4 = 10
			2.1		2.1.1	Fasilitas	Jumlah Dokumen Hasil	Kali	TW 1 = 1

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Industri Kecil Menengah yang Telah Memiliki Izin Usaha	27,50 (Persen)	Program pengendalian izin usaha industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kabupaten/Kota	Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi dengan Sistem OSS		TW 2 = 1
								TW 3 = 1
								TW 4 = 1
	Persentase Penyelesaian	84 (Persen)	Program Pelayanan	3.1 Pelayan Perizinan dan Non	3.1.1 Penyediaan	Jumlah Pelaku Usaha yang	Pelaku Usaha	TW 1 = 50

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu		Penanaman Modal	Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		TW 2 = 50
	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	30 (Persen)						TW 3 = 50
	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Tinggi						TW 4 = 25
Meningkatkan data dan informasi perizinan dan	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan	83,33 Persen	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi	4.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada	4.1.1 Pengolahan , Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Dokumen	TW 1 = 3 TW 2 = 3 TW 3 = 3 TW 4 = 3

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
non perizinan yang terintegrasi	yang terintegrasi		Penanaman Modal	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		
	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	71,43 Persen						
Meningkatkan investor yang berinvestasi	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	64,84 Persen	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5.1	5.1.1	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	TW 1 =
								TW 2 =
								TW 3 =
								TW 4 = 1
		66,67 Persen		5.2	5.2.1	Penyediaan		TW 1 =

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Merealisasikan Investasinya		Penanaman Modal	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penanaman Modal	Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		TW 4 = 5
					5.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	TW 1 = TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 =
					5.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Kegiatan usaha	TW 1 = 10 TW 2 = 10 TW 3 = 20

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Modal	Pengawasan		TW 4 = 10
Meningkatnya produksi industri kecil dan menengah	Nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan	Rp. 254.902.923	Program perencanaan dan pembangunan industri	6.1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	6.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan an, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	TW 1 = 1
								TW 2 = 1
								TW 3 = 1
								TW 4 = 1
	Persentase Pertambahan Industri Kecil dan Menengah	5,80 Persen			6.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	TW 1 = 1
								TW 2 = 1
								TW 3 = 1
								TW 4 = 1

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					6.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	TW 1 = 1 TW 2 = 1 TW 3 = 1 TW 4 = 1
					6.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	TW 1 = 1 TW 2 = 1 TW 3 = 1 TW 4 = 1
					6.1.5	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Evaluasi	TW 1 = 3 TW 2 = 3

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Rencana Pembangunan Industri	Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		TW 3 = 3 TW 4 = 3
	Persentase Data Informasi Industri Di SIINAS	58,33 Persen	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	6.2	6.2.1	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Dokumen	TW 1 = 1 TW 2 = 1 TW 3 = 1 TW 4 = 1
Meningkatnya PDRB sector perdagangan	PDRB sector perdagangan (Milyar Rupiah)	559,94 Milyar Rupiah	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	7.1	7.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	TW 1 = TW 2 = 1 TW 3 = 1 TW 4 =
	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana	100 Persen			7.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	TW 1 = 4 TW 2 = 4

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	Distribusi Perdagangan	3,59 Persen	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		gan	Sarana Distribusi Perdagangan		TW 3 = 4 TW 4 = 4		
				7.2	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	7.2.1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	TW 1 = 1 TW 2 = 1 TW 3 = 1 TW 4 = 1
				7.3	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	7.3.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat	Laporan	TW 1 = 4 TW 2 = 4 TW 3 = 3 TW 4 = 4

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Sistem Informasi Perdagangan	yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		
					7.3.2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		TW 1 = 1 TW 2 = TW 3 = TW 4 =
				7.4 Pengawasan Pupuk dan	7.4.1 Pengawasan Penyaluran dan	Jumlah Laporan Pengawasan	Laporan	TW 1 = 1

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		TW 2 = 1 TW 3 = 1 TW 4 = 1
	Produk Unggulan yang Memenuhi Standar Ekspor	1 (Produk)	Program pengembangan ekspor	7.5 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.5.1 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	TW 1 = TW 2 = TW 3 = 1 TW 4 =
	Persentase UTP	72,00 (Persen)	Program standardisasi	7.6 Pelaksanaan Metrologi Legal,	7.6.1 Pelaksanaan Metrologi		Unit	TW 1 = 50

Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Bertanda Tera Sah yang Berlaku		dan perlindungan konsumen	Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		TW 2 = 400
								TW 3 = 150
								TW 4 = 100
					Persentase Kesesuaian BDKT yang Diawasi Terhadap Ketentuan yang Berlaku	70 (Persen)		
TW 2 = 8								
TW 3 = 7								
TW 4 =8								
			13 Program	23 Kegiatan	44 Sub Kegiatan			

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur,



Harli Agusta, ST
NIP 19750821 200212 1 005

